

REINTERPRETASI PAHAM KAPITALIS DAN SOSIALIS DALAM PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM YANG RELIGIUS-HUMANIS

Sutrisno* Haidir, M. Efendi, Rahmi Lestari*
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
tryznoswtsi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ulang paham kapitalis dan sosialis dan menformulasikan ke dalam paradigma Pendidikan Islam yang religius dan humanis sebagai jalan tengah dan kompromi atas perbedaan pemikiran antara kapitalisme dan sosialisme yang mempengaruhi dunia Pendidikan di era globalisasi. Pendekatan analisis dengan menggunakan kajian literatur-literatur kepustakaan (*Library Research*), jurnal dan website. Hasil analisis, bahwa sistem kapitalis yang dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan maksimal dengan memberikan kebebasan persaingan dalam segala hal termasuk Pendidikan telah merubah orientasi dasar filosofis lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, dari sekedar menjadi penyedia jasa pasar kerja sampai mencari modal dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal dalam Islam terdapat larangan monopoli dan berlebih-lebihan dalam menumpuk harta yang hanya akan memunculkan klaster orang atas dan bawah. Begitu juga dengan paham sosialis yang mengedepankan persamaan, keadilan, membela kaum lemah, penghapusan hak pribadi atas alat-alat produksi, sebenarnya tidak ada masalah dengan konsep Islam, akan tetapi yang membedakan adalah cara yang ditempuh dalam mewujudkan cita-ciat sosialisme itu sendiri. Untuk mengkompromikan dua paham ini perlu ditempuh paradigm Pendidikan Islam yang religius dan humanis, guna mewujudkan Pendidikan Islam yang memanusiakan manusia dan berkarakter religius. Sebagaimana tujuan Pendidikan utama dari Pendidikan Islam yaitu menghantarkan peserta didik menuju insan kamil dan menjadi *kholifah* di muka bumi yang *Rahmatan lil 'Alamin*.

Kata Kunci: Kapitalisme, Sosialisme dan Pendidikan Islam

Abstraction:

This article aims to re-interpretation capitalist and socialist ideas and formulate a religious and humanist Islamic education paradigm as a middle way and compromise on the differences in thinking between capitalism and socialism that affect the world of education in the era of globalization. The analytical approach uses a review of literature (Library Reserch), journals and websites. The results of the analysis show that the capitalist system which is influenced by the spirit of obtaining maximum benefits by providing freedom of competition in all matters including education has changed the institutions, from simply being a provider of

labor market services to seeking capital and profits as much as possible. Whereas in Islam there is a prohibition on monopoly and exaggeration in accumulating assets which will only create clusters of top and bottom people. Likewise with the socialist notion that promotes equality, justice, defends the weak, abolishes personal right over the means of production, in fact there is no problem with the Islamic concept, but what distinguishes it is the method taken in realizing the ideals of socialism itself. To compromise these two understanding, it is necessary to adopt a religious and humanist paradigm of Islamic Education, in order to create an Islamic Education that humanizes humans and has religious character. As the main educational goal of Islamic Education is to deliver students to human beings and become kholifah on the earth who are Rahmatan lil 'Alamin.

Keywords: Capitalism, Socialism and Islamic Education

Pendahuluan

Pendidikan adalah sarana untuk memelihara kehidupan manusia, ini berarti bahwa pendidikan semata untuk memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terbaik. yaitu memelihara dan mengembangkan sesuai potensi *fithrah*-nya. Berbicara tentang “Pendidikan Islam” bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan entitas lain yang saling bersinergi. Oleh karenanya pembahasan tentang pendidikan tidak akan mengalami titik final selama kehidupan manusia masih ada. Proses transformasi sosial budaya yang semakin cepat dan pergeseran nilai kemanusiaan yang tak terbendung, terilhami oleh pergaulan bebas dunia barat yang sangat sekuler lewat berbagai tindakan propagandisnya.

Pergeseran nilai kemanusiaan tersebut akan menjadi tanggung jawab berat institusi pendidikan islam guna menata kembali nilai kemanusiaan yang sudah berada pada titik nadir. Sehingga jangan disalahkan jika fenomena tersebut menjadi sasaran kritik Paulo Preire dalam bukunya “Pendidikan Kaum tertindas” yaitu: Pendidikan kaum tertindas yang dijiwai oleh rasa kedermawanan,kemurahan hati, humanis yang menampilkan diri sebagai sebuah pendidikan bagi seluruh ummat manusia. Pendidikan yang dimulai dengan kepentingan egoistik kaum penindas dan menjadikan kaum tertindas sebagai objek humanitarianisme mereka, justru mempertahankan dan menjelaskan penindasan itu sendiri dan ia merupakan perangkat dehumanisasi (Preire, 1991). Keadaan ini dipicu oleh perkembangan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi di era globalisasi yang telah menjamah seluruh kawasan dunia yang ditandai dengan pesatnya persaingan global melalui eksplorasi dan pengembangan industri secara besar-besaran. Munculnya paham sekuler yang diikuti dengan kapitalisme dan sosialisme menambah ketatnya persaingan kepentingan antar negara dan secara tak sadar menyebabkan pergeseran nilai dan kemanusiaan dalam dunia Pendidikan.

Kapitalisme pendidikan merupakan istilah yang sudah banyak digunakan yang bermuara pada pemahaman bahwa pendidikan tidak lebih dari sekedar sarana mencari uang. Dalam kapitalisme pendidikan, segala sesuatunya diukur dan dinilai

dengan sejumlah uang. Paradigma yang dipakai model ini sangat berbeda dengan paradigma dalam pendidikan Islam yang menganggap bahwa pendidikan merupakan instrument” pemanusiaan manusia”, (Sofwanudin, 2004), kapitalisme pendidikan kadang diistilahkan dengan “komodifikasi pendidikan” sebagaimana Mansour Fakih (Fakih, 2001) menyebutnya, istilah tersebut memiliki muara yang sama dengan istilah kapitalisme pendidikan yaitu pendidikan menjadi sarana akumulasi kapital.

Seiring menjalarnya kapitalisme dalam kehidupan ummat manusia, yang telah merubah cara pandang terhadap pendidikan, dengan pandangan bahwa pendidikan adalah investasi besar dalam menjamin terakumulasi modal, pada saat itu juga pendidikan telah beralih fungsi. Pendidikan yang semula sebagai aktivitas sosial budaya berubah menjadi komunitas budaya yang siap diperjual belikan. Pendidikan yang semula dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju tataran ideal, yang menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atas sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil (Dhakiri, 2000) yang dilakukan melalui aktivitas sosial budaya, telah hilang makna perenialnya, pendidikan menjadi ajang mencari laba dan aktivitas mencari keuntungan. Fenomena naiknya biaya pendidikan (sekolah) di negara Indonesia terutama di perkotaan yang semakin menggila, nampaknya terjadi seiring berubahnya orientasi dasar filosofis di berbagai lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, yaitu pendidikan sekedar menjadi penyedia jasa untuk pasar kerja.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang bahwa tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat dan mencegah pemusatan kekayaan hanya di kalangan sekelompok kecil orang kaya sebagaimana yang ada dalam kapitalisme. Al-Quran menyebutkan “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di kalanganmu” (QS. 59: 7). Islam menentang pula adanya perbedaan yang menyolok dalam hal kekayaan seperti yang terdapat dalam kapitalisme. Lebih dari satu ayat dalam al-Qur'an yang menentang adanya kekayaan yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang hidup bermewah-mewah. “orang-orang yang zhalim hanya mementingkan kehidupan mereka yang mewah, dan mereka lah orang-orang yang berdosa” (QS. 11: 16). “Hingga apabila Kami turunkan siksa kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, dengan serta merta mereka pun berteriak meminta pertolongan” (QS. 23: 64).

Meski demikian, Islam tidak menentang orang kaya asalkan dia dapat menguasai dirinya. Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan tetapi dicari dalam rangka berbakti kepada Allah (*hablum minallah*) dan untuk melaksanakan amal solih, yang bermanfaat bagi sesama (*hablum minannas*). Syekh Az-zarnuji menyatakan dalam kitab ta'lim muta'alim bahwa apabila seseorang dianugrahi kekayaan dan dimiliki oleh orang yang sholih, maka dengan hartanya itu ia dapat berbakti kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan dalam rangka mensyukuri nikmat akal dan ilmu sehingga menyebabkan tambahnya

ilmu, bahkan beliau menyebutkan bahwa diantara enam syarat menuntut ilmu (cerdas, sungguh-sungguh, sabar, biaya, bimbingan Guru dan waktu lama) itu dintaranya adalah harus memiliki harta, biaya/*bulghoh* (Az-Zarnuji, tt). Hal Ini menunjukkan bahwa makna kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan makna yang terdapat dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme. Sistem tersebut menganggap bahwa kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan (Khobir, 2010).

Selain paham kapitalis, sosialisme juga ternyata sangat berpengaruh terhadap peradaban dunia khususnya dunia Pendidikan. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Konsep sosialisme ini boleh dibilang bertentangan dengan konsep individualisme, dimana sosialisme menempatkan kepentingan umum sebagai yang utama dan kepentingan individu diletakkan dibelakang, kebalikan dari individualisme yang menempatkan kepentingan individu berada di depan dan kepentingan sosial berada di belakang (Wibisono, 2012).

Tjokroaminoto dalam bukunya yang terbit tahun 1924, Islam dan Sosialisme, jelas menentang konsep-konsep sosialismenya Marx, dan juga kapitalisme. Dengan alasan karena menjauhkan manusia dari agama dan memperlihatkan watak individualisme yang rakus untuk menimbun harta yang ujung-ujungnya dapat dijadikan sebagai alat penindas rakyat. Ia membandingkan temuannya dengan pemikirannya sendiri mengenai dasar-dasar sosialisme dalam Islam, dengan memetik sejumlah ayat Al-Qur'an, juga mengutip hadis. Diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 213: Perikemanusiaan itu adalah satu kesatuan (Tjokroaminoto, 1924). Konsep sosialisme yang jika diinterpretasikan dengan sikap *ta'awun* atau gotong royong dan saling tolong-menolong ini sesuai dengan ayat:2 surah al-Maidah: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...".

Para tokoh pemikir Islam yang mencoba menggagas pemikiran sosialisme dalam Islam, memiliki kesamaan dari segi tertentu. Adapun letak perbedaannya terutama pada sikap menerima dan menolak istilah sosialisme, karena ia berasal dari luar Islam sehingga tidak dapat dianggap dan tidak dapat dipergunakan dalam Islam yang memiliki karakteristik sosial tersendiri. Sementara itu, tokoh-tokoh lainnya dapat menerima istilah sosialisme tersebut, dengan cara mengandengkannya dengan Islam sehingga menjadi "Sosialisme Islam". Hanya Ali Syari'ati yang menerima istilah sosialisme disandingkan dengan Islam, sedangkan Sayyid Qutub dan Mustafa al-Siba'iyy menolaknya, dan cenderung kepada label pertama yaitu *al-Ijtima'iyah all'Islamiyah*.

Interpretasi ulang dalam memaknai paham kapitalis dan sosialis ini akan berujung pada konsep Pendidikan yang religius-humanis, dimana pembaharuan paradigma dalam pendidikan Islam menjadi satu hal yang urgen untuk segera diterapkan. Paradigma humanisme religius merupakan paduan paradigma yang menurut penulis sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan Islam baik dalam

konteks khusus Indonesia maupun konteks umum seluruh kawasan muslim dalam rangka menghadapi dampak kapitalisme global saat ini. Artinya, dengan upaya yang bersifat menguatkan kapasitas dari dalam dirinya, pendidikan Islam, akan mampu menunjukkan eksistensinya dan mengikuti perkembangan zaman.

Istilah pendidikan humanis-religius mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yaitu pendidikan humanis dan pendidikan religius. Pendidikan humanis yang menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius agar dapat membangun kehidupan individu (sosial) yang memiliki kemerdekaan, tetapi dengan tidak meninggalkan (sekuler) nilai-nilai keagamaan yang diikuti masyarakat atau menolak nilai ketuhanan (ateisme). (Sutiyono, 2009).

Pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional, dasar negara dan filosofi *al muhafazhotu 'ala al-qodiimi as shoolih wa al akhdzu 'ala jadiidi al aslah* (mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik) merupakan mantra paradigma berkemajuan, kontinuitas, keterbukaan dengan inovasi untuk melakukan *transfer of knowledge and technology* yang maslahat bagi pengembangan pendidikan Islam, (Rahman, 2019)

Membangun paradigma baru dalam dunia pendidikan dengan memaknai ulang kapitalisme dan sosialisme guna meningkatkan akselerasi kualitas Pendidikan Islam yang maju dan memanusiakan manusia adalah sebuah keniscayaan, terlepas dari sisi positif- negatif pengaruh paham kapitalis dan sosialis.

Konsep Paham Kapitalis

Kapitalisme secara etimologi berasal dari kata capital (Bahasa Latin). Capital sebenarnya diambil dari kata caput yang berarti kepala. Arti ini menjadi jelas jika digunakan dalam istilah "pendapatan per kapita" yang berarti "pendapatan per kepala" (Armando, 2005). Mengenai capital yang diterjemahkan sebagai modal, ini berawal dari sejarah Romawi Kuno. Bagi penduduk Romawi Kuno, kekayaan diukur dengan seberapa banyak caput (kepala) hewan ternak yang ia miliki. Semakin banyak caput yang dimiliki, maka dianggap semakin kaya. Mereka kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya caput sebagai modal untuk mewujudkan kesejahteraan. Itulah sebabnya, dewasa ini capital diterjemahkan sebagai "modal" (Armando, 2005). Adapun kata "isme" bermakna paham atau ideologi (Dep.Diknas, 2008).

Kapitalisme secara terminologi berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme menyatakan bahwa tidak ada pembatasan dari

negara bagi warganya guna memiliki property atau asset pribadi, sehingga dimungkinkan terjadinya akumulasi modal pada perorangan (individu atau korporasi). Mekanisme seperti ini membuat kesejahteraan orang tersebut dapat meningkat (Winardi, 1996).

Kapitalisme terwujud karena ditopang oleh liberalisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan dalam berbagai sendi kehidupan warga negaranya, sehingga Kapitalisme pendidikan merupakan istilah yang sudah banyak digunakan dan bermuara pada pemahaman bahwa pendidikan tidak lebih dari sekedar sarana mencari uang. Dalam kapitalisme Pendidikan, segala sesuatunya diukur dan dinilai dengan sejumlah uang. Paradigma yang dipakai dalam model itu amat berbeda dengan paradigma dalam pendidikan Islam yang menganggap bahwa pendidikan merupakan instrument “pemanusiaan manusia” (sofwanudin, 2004). Kapitalisme pendidikan kadang diistilahkan dengan “komodifikasi pendidikan” sebagaimana Mansour Fakih (Fakih, 2001), menyebutnya istilah tersebut memiliki muara yang sama dengan istilah kapitalisme pendidikan yaitu pendidikan menjadi sarana akumulasi kapital. Hal itu terilhami oleh semangat dan orientasi dari kapitalisme yang dalam sejarah perjalannya selalu diiringi dengan misi pengembangan dan akumulasi modal.

Sebagai sistem perekonomian yang berkembang sejak abad 16, kapitalisme telah mengalami beberapa kali metamorfosis dalam perjalannya mencapai akumulasi modal. Negara hanya dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum. Berkaitan urusan yang lain diserahkan kepada masyarakat sendiri untuk mengaturnya (Andreski, 1989).

Max Weber (1867-1920), peletak dasar sosiologi modern dalam bukunya *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* mendefinisikan kapitalisme sebagai hadirnya industri bagi kebutuhan kelompok manusia yang dilaksanakan dengan metode perusahaan yang dikelola secara rasional, seperti adanya neraca modal. Weber menggunakan semangat kapitalisme untuk menggambarkan sikap mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis (Weber, 2006). Kapitalisme sebagai sistem hidup mempunyai ciri, yaitu: (1) pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu; (2) pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi; (3) pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin; (4) kebebasan melakukan kompetisi; (5) mengakui hukum ekonomi pasar atau mekanisme pasar (Mas'oed, 2003). Dari ciri-ciri tersebut dapat simpulkan bahwa watak dasar kapitalisme bersifat individualistik, liberal, profit oriented, kompetitif, dan berorientasi pasar.

Kapatalisme telah diyakini sebagai akhir dari peradaban manusia dewasa ini. Hal ini digambarkan oleh tesis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and the Last Man*. Dalam buku ini, Fukuyama menyimpulkan bahwa sejarah peradaban manusia akan berakhir pada ideologi kapitalisme. Oleh karena itu, nilai-nilai kapitalisme yang memenangkan sekaligus menentukan sejarah peradaban

umat manusia saat ini dan selanjutnya (Fukuyama, 1999). Tesis Fukuyama ini telah dianut oleh sebagian besar dari penduduk dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia. Banyak bukti dalam kehidupan keseharian yang tidak terlepas dari pengaruh arus kapitalisme global.

Eksistensi diri manusia dewasa ini telah diatur oleh perangkat dan sistem kapitalisme global yang begitu halus, tetapi tidak manusiawi. Tidak ada satu faktor kehidupan pun yang dapat lepas secara total dari perangkat kapitalisme global, baik itu pendidikan, budaya, sosial, agama. Bahkan, Capra menyebut, kendirian manusia itu sendiri pudar bersama mesin-mesin kapitalis, iklan, dan simbol-simbol yang serba nisbi (Capra, 2000). Kemudian setiap orang sudah tidak dapat membedakan mana asli dan palsu, mana kenyataan dan imajinasi, mana simbol dan subtansi, mana keinginan dan kebutuhan. Semuanya menyatu dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Kerancuan atau dengan kata lain turbulensi ini merupakan efek ekspansi sistem kapitalis ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat modern.

Kapitalisme merupakan bentuk dominasi dan eksloitasi manusia atas manusia yang lain. Ekspansi kapitalisme ini mengakibatkan ketergantungan pada sejumlah negara yang pada akhirnya memicu konflik (peperangan/penindasan), (Prasetyo, 2003). Secara teoritis perubahan-perubahan model yang dijadikan sebagai mekanisme kapitalisme dalam memperoleh modal berakar pada ideologi yang sama, hanya saja pendekatan dan mekanismenya saja yang berbeda, semakin canggih, yang secara ekonomis berwatak eksploratif, secara politik berwatak represif dan secara budaya berwatak hegemonik dan diskursif.

Program tersebut dilandasi atas alasan untuk meningkatkan kualitas anak didik dan untuk mempermudah jalannya sistem pendidikan di sekolah, tapi di balik itu semua terdapat motivasi bisnis, yang mana seorang guru dan lembaga berfungsi sebagai birokrasi perusahaan dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Semua praktik bisnis di sekolah itu berjalan lancar karena kolusi antara pengusaha (industri wisata, penerbitan, tekstil, asuransi, sepatu dan lain sebaginya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan, dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktik bisnis tersebut (Darmaningtyas, 2004).

Islam dan Kapitalisme

Kapitalisme tampil sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandarkan kepada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralisir paham sekularisme dan materialisme yang cenderung melepaskan diri dari ikatan agama. Dalam praktik etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi menurut paham kapitalisme dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan, bahkan dalam pandangannya, aktivitas duniawi dan imbalan dari aktivitas tersebut merupakan “takdir Ilahi”. Menurut teori Weber, nilai-nilai dan alasan religius ini memberi dorongan dan energi emosional bagi kaum materialisme, dan faktor ini sangat penting bagi kemunculan dan perkembangan pesat kapitalisme (Nanji, 2003).

Islam tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat dan mencegah pemusatan kekayaan hanya di kalangan sekelompok kecil orang kaya sebagaimana yang ada dalam kapitalisme. "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di kalanganmu" (QS. 59: 7). Islam menentang pula adanya perbedaan yang menyolok dalam hal kekayaan seperti yang terdapat dalam kapitalisme. Lebih dari satu ayat dalam al-Qur'an yang menentang adanya kekayaan yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang hidup bermewah-mewah. ".....orang-orang yang zhalim hanya mementingkan kehidupan mereka yang mewah, dan mereka lahir orang-orang yang berdosa" (QS. 11: 16). "Hingga apabila Kami turunkan siksa kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, dengan serta merta mereka pun berteriak meminta pertolongan" (QS. 23: 64). Walaupun demikian, Islam tidak menentang orang kaya asalkan dia dapat menguasai dirinya. Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan tetapi dicari untuk berbakti kepada Allah dan untuk melaksanakan perbuatan yang baik, yang bermanfaat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa makna kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan makna yang terdapat dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme. Sistem tersebut menganggap bahwa kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Dalam pola ekonomi kapitalis dikenal adanya prinsip-prinsip kebebasan individu tanpa batas, adanya kelas-kelas dan eksloitasi kaum proletar yang berlebih, serta adanya pasar bebas. Islam mempunyai pola ekonomi yang berbeda dengan pola ekonomi kapitalis. Menurut Mustafa Mahmud, pola kehidupan ekonomi Islam bertolak dari ajaran-ajaran tentang pemenuhan kebutuhan, kepentingan, kerja sama, saling tolong menolong, tidak bertolak dari perjuangan dan perlawanan antar kelas masyarakat (Mahmud, 1984). Pola Islam itu berusaha mencari keseimbangan antara individu di dalam masyarakat dan tidak mengorbankan masyarakat untuk kebaikan kelompok kapitalis yang minoritas. Dengan kata lain kebebasan individu untuk memperoleh keuntungan adalah suatu prinsip dalam pola ekonomi Islam berbarengan dengan prinsip hak milik pribadi, campur tangan negara di bidang perekonomian dan hak milik bersama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam tidak memperkenankan eksloitasi terhadap si miskin oleh si kaya, ia juga tidak memberikan ampunan kepada orang memiliki investasi (modal) tanpa batas dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya. Islam memang mengharamkan konsumsi pribadi yang tidak rasional, tetapi satu sisi memuji sedekah sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Kekayaan pribadi dalam Islam merupakan amanat suci yang harus dinikmati oleh semuanya, terutama oleh fakir miskin yang membutuhkan (Naqvi, 1985).

Pembicaraan lebih lanjut tentang respon Islam terhadap kapitalisme kiranya dapat didasarkan pada permasalahan berikut: "Apakah Islam itu anti kapitalis" adalah merujuk pada pandangan bahwa Islam adalah berlawanan dengan kemajuan, rasionalitas, kebebasan dan demokrasi (Binder, 1988). Kritik-kritik terhadap Islam semacam ini sering diajukan untuk menjelaskan keterbelakangan masyarakat dan

kelemahan militer dari kerajaan-kerajaan Islam, tetapi kritik-kritik semacam ini tidak didasarkan kepada penemuan ilmiah. Tetapi kritik tersebut lebih merefleksikan kesan masyarakat Barat dan nilai-nilai kelas yang dominan yang cenderung diterapkan demi suksesnya satu sistem masyarakat yang didominasi oleh Barat. Kritik-kritik tersebut juga berkaitan dengan beberapa ketentuan khusus hukum Islam. Sehingga mengarahkan Barat kepada sesuatu hal yang masuk akal, yang secara berkala mempengaruhi intelektual Islam. Rodinson berpendapat bahwa Islam tidak saja memiliki semangat rasional tetapi juga semangat komersial (Rodinson, 1974). Dan orang-orang Islam selalu bisa bekerja memenuhi ketentuan-ketentuan khusus al-Qur'an yang dimaksudkan untuk melawan rasionalitas ekonomi, itu adalah tidak benar sanggah Radinson. Yang benar adalah sejarah Islam telah ditentukan baik oleh karakter kewahyuan yang murni (nash) atau formasi sosial yang dipelihara pada masa awal Islam. Masyarakat awal Islam bukanlah masyarakat yang melestarikan perbudakan maupun feodal. Islam dimaksudkan untuk mengintegrasikan masyarakat Badawi dengan pusat perdagangan dan budaya Arab. Tetapi seiring perubahan masyarakat itu Islam terpecah dan kompleks ketika mengadopsi syarat-syarat struktur negara pada masyarakat pertengahan.

Dengan demikian tidak ada struktur ekonomi tertentu yang dominan atau sesuai dengan Islam. Kapitalisme pernah eksis begitu pula model-model produksi yang lain dalam sejarah Islam. Lebih lanjut Rodinson menyatakan bahwa kapitalisme adalah merupakan faktor eksternal yang ada di negara-negara Islam. Tetapi agama Islam tidak menghalangi masuknya kapitalisme. Tidak ada yang istimewa tentang kapitalisme dalam Islam, yang ada adalah pelarangan eksplorasi dan kekejaman (Rodinson, 1974).

Konsep Paham Sosialis

Sosialisme berasal dari kata sosial yang ditambah dengan kata akhiran “isme”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ‘sosial’ diartikan dengan hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. (Poerwadarminta, 1976). Sedangkan sosialisme diartikan dengan aliran yang berhubungan secara langsung (interaksi sosial) yang terjadi dalam masyarakat. Sosialisme merupakan salah satu ajaran yang menginginkan penghapusan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat (Kahmad, 2002). Ajaran ini mengelaborasikan antar kehidupan mewah dengan kehidupan kelas bawah, sehingga melahirkan keseimbangan hidup dalam sebuah tatanan masyarakat. Mengamati hal tersebut, maka sistem sosial menganalisis tiga aspek penting, yaitu: *pertama*, hubungan umum dari berbagai sistem; *kedua*, situasi normal atau situasi keseimbangan, sejajar dengan kondisi normal, dan *ketiga*, semua sistem melakukan reintegrasi kepada sistem normal. Sosialisme pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mensejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong perkembangan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, Sayyid Quthb menerangkan bahwa “pada tahap berikutnya sosialisme adalah proses memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam mencapai taraf kesejahteraan yang abadi” (Turner, 2000).

Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Menguraikan sosialisme ini, namun demikian bukanlah perkara yang mudah. Ian Adams, dalam bukunya yang berjudul *Ideologi Politik Mutakhir*, menuliskan bahwa dari semua ideologi, sosialisme mungkin yang paling sulit untuk diuraikan (Adams, 1993). Kesulitan tersebut muncul karena sulitnya menentukan sosialisme yang 'sejati' karena pada perkembangannya ada banyak ragam sosialisme, termasuk di dalamnya sosialisme Marx-ian yang memiliki pengaruh sangat besar, bahkan hingga saat ini (Adams, 1993).

Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *socialism* berasal dari bahasa Perancis, yaitu, social yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau Lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Secara terminologi, istilah sosialisme dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Franz Magnis-Suseno misalnya, menulis bahwa sosialisme merupakan, (1) ajaran dan Gerakan yang menganut- nya bahwa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi, (2) Keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus (Suseno, 2001). Selain itu ada juga Sosialisme Ilmiah yang diklaim oleh Karl Marx yang mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah, adalah sosialisme yang mau memperlihatkan dengan meniliti hukum-hukum perkembangan masyarakat bahwa sosialisme pasti akan datang (Suseno, 2001).

Sosialisme, di dalam *Encyclopedia of Social History* didefinisikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Sosialisme, pertama kali muncul sebagai reaksi atas berkembangnya industrialisme dan kapitalisme pada abad 19-20. Kebanyakan dari teoritis sosialisme menyarankan pentingnya kerja sama, perencanaan, dan kepemilikan publik, untuk melawan kompetisi dan pencarian laba individual sebagaimana digagas oleh kapitalisme (Stearns, 1994). Definisi lain tentang sosialisme dapat juga dilihat dalam Kamus Filsafat karya Lorens Bagus, yang menyatakan bahwa istilah sosialisme menunjuk pada "asosiasi apapun, bisa pribadi (swasta) atau umum (pemerintah)". Salah satu ciri khas dari pemikiran sosialisme adalah pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok (Bagus, 2002).

Secara historis atau dari segi sejarahnya, istilah sosialisme bukanlah istilah yang mudah untuk dilacak dalam sejarah Ebenstein, dalam bukunya *Today Isms, Communism, Fascism, Socialism, Capitalism*, menulis bahwa sebenarnya sulit untuk menentukan waktu yang tepat,kapan ide atau gagasan tentang sosialisme

tersebut muncul. Ada yang menganggap bahwa ide tentang sosialisme sebenarnya sudah muncul dalam gagasan Plato sebagaimana tertulis dalam Republic; dan ada juga yang mengatakan bahwa ide sosialisme sebenarnya berasal dari Bibel, khususnya dari Kitab Perjanjian Lama. Cita-cita yang sekarang disebut dengan, sosialisme itu sudah ditemukan sejak dalam budaya Yunani kuno.

Kemunculan sosialisme yang baru tersebut diasosiasikan dengan karya Thomas Moore, Utopia yang diterbitkan pada tahun 1516 di masa Renaissans (Ebenstein, 1965). Gagasan Thomas Moore tersebut belakangan disebut dengan sosialisme klasik karena memang memiliki corak yang berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang belakangan. Karl Marx, belakangan menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis, yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri, yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial, dan tidak lagi religius: ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia dan karena itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern (Suseno, 2001).

Berbeda dengan sosialisme klasik, sosialisme modern muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Sosialisme modern berkembang pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap pengaruh sosial industrialisasi yang terjadi di daratan Eropa. Bertolak belakang dengan perkembangan industri yang sangat pesat, kesejahteraan kaum pekerja justru menurun (Adams, 1993). Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Orang pertama yang menyuarakan cita-cita masyarakat tersebut, yang akan menjadi acuan kaum sosialis aliran keras adalah Francois Noel Babeuf. Babeuf memaklumkan perang kaum miskin melawan kaum kaya, Nilai tertinggi Babouvisme, atau gerakan para pengikut Babeuf, adalah kesamaan. Merekalah yang pertama kalinya menyuarakan tuntutan-tuntutan inti komunisme di kemudian hari, seperti sosialisasi alat-alat produksi dan kediktatoran proletariat (Suseno, 2001).

Islam dan Sosialisme

Paham sosialis yang mengajarkan tentang kesetaraan derajat, persamaan hak, menegakkan keadilan dan membela kaum lemah sebenarnya ada relevansinya

dengan konsep Islam yang juga mengajarkan kepada para pemeluknya untuk memiliki sifat perikemanusiaan, menegakkan keadilan, menghapus perbudakan dan membantu yang lemah. "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap bapak ibu dan kerabatmu jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segalaapa yang kamu kerjakan (QS. Annisa: 135).

Dalam hal menghormati hak kaum buruh, Rasululloh SAW bersabda: "bayarkanlah upah buruh sebelum kering keringatnya). Dari kedua dalil tersebut telah jelas bahwa pemikiran kemanusiaan atau cita-cita Marx sesuai dengan konsep Islam akan tetapi cara memperjuangkannya sangat bertentangan dengan Islam. Hal inilah yang membedakan paham sosialis Marx dengan paham Islam.

Sosialisme merupakan salah satu ajaran yang menginginkan penghapusan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ajaran ini mengelaborasikan antara kehidupan mewah dengan kehidupan kelas bawah, sehingga melahirkan keseimbangan hidup dalam sebuah tatanan masyarakat. Mengamati hal tersebut, maka sistem sosial menganalisis tiga aspek penting, yaitu: pertama, hubungan umum dari berbagai sistem; kedua, situasi normal atau situasi keseimbangan, sejajar dengan kondisi normal, dan ketiga, semua sistem melakukan reintegrasi kepada sistem normal. Karena itu, sosialisme pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong perkembangan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, Sayyid Quthb menerangkan bahwa "pada tahap berikutnya sosialisme adalah proses memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam mencapai taraf kesejahteraan yang abadi" (Turner, 2000).

Sayyid Quthb menjelaskan sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang disodorkan oleh Kristen dan Komunisme. Dimana Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmaniahnya, antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan materialnya. Di sini Islam memandang alam semesta dan kehidupan di dalamnya dengan universal, tidak parsial dan terpisah-pisah (Quthb, 1993).

Sebuah analisis menyatakan ada kesamaan karakter perjuangan Islam dan sosialis, yakni sama-sama memperjuangkan "kaum tertindas". Yang perlu digaris bawahi antara Islam dan Sosialisme adalah gambaran yang berbeda dalam lingkaran kehidupan umat manusia baik dari sumber maupun nilai. Akan tetapi ada kesamaan spirit keduanya dalam menegakkan keadilan dalam realitas sosial.

Sayyid Quthb menyatakan atas Islam dalam menegakkan keadilan memiliki beberapa fondasi atau asas yang utama yaitu: *Pertama*, kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan yang penuh, yang tidak hanya dinilai dari sisi maknawi atau sisi ekonomi semata, melainkan pada dua sisi

itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Dalam Islam, orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh (QS. al-Hujurat: 13):11

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Maksudnya manusia terdiri dari aneka jenis dan warna, yang bervariasi kabilah dan bangsa, sesungguhnya manusia tersebut berasal dari asal yang sama, maka manusia diperintahkan untuk tidak berselisih, berpecah-pecah dan saling bertengkar. Kedua, persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam, tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari keturunan bangsawan. Islam datang untuk menyatakan kesetaraan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang membedakan diantara manusia, kecuali amal saleh dan tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Persamaan tersebut dapat juga dipahami sebagai persamaan yang dilatar-12 belakangi oleh faktor ekonomi. Artinya, kemuliaan yang hakiki tidak dimiliki oleh seseorang karena ia orang memiliki kekayaan, juga bukan karena jabatan dan sebagainya. Sosialisme Sayyid Quthb berorientasi kepada ayat-ayat al-Qur'an yang di dalamnya disebutkan konsep-konsep kehidupan sosial yang telah digariskan Allah. Dan ini merupakan aturan kehidupan sosial yang berlandaskan petunjuk Ilahi. Sebagai contoh, persoalan yang umumnya terjadi adalah kemiskinan yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kalangan kaya dengan miskin. Hal ini merupakan masalah umum dihadapi oleh masyarakat dunia. Umat Islam merupakan bagian dari penduduk dunia yang juga memiliki pandangan hidup sosialis.

Menyangkut perjuangan kelas (Class struggle) sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx dalam teori sosialismenya, menurut H. Agus Salim sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif mengatakan, "Muhammad telah membela dengan keras ekonomi sosialis sejak dua belas abad sebelum Marx lahir."(Ma'arif, 1985). Oleh sebab itu, menanggapi konsep sosialisme Islam dapat diteliti serta didalami dalam Islam sendiri adanya unsur sosialisme atau tanggungjawab sosial.

Ali Syari'ati dikenal sebagai tokoh dari Iran yang membawa pencerahan ide-ide tentang sosialisme dalam pandangan Islam. Buku seperti *Religion vs. Religion* dan *On the Sociology of Islam* adalah buku yang banyak dibaca tentangnya. Karena dilihat dari istilah 'sosialisme' itu sendiri adalah milik 'luar' Islam (non Islam) yang tidak layak diterapkan di dunia Islam. Namun anggapan

tersebut segera ditepis oleh Mahmud Syaltut. Ia memberi jaminan bahwa sosialisme itu tidak bertentangan dengan Islam (Esposito, 1984).

Maka munculnya ide pemikiran yang mencoba mencari alternatif baru bagi ideologi-ideologi Barat yang coba dicangkokkan di negara-negara Islam. Kemudian pemikiran tersebut dimunculkan dalam buku seperti *Al-Ijtima'iyah al-Islamiyah* (Sosialisme Islam) dari Muhammad Quthb yang tidak ingin mengadopsi nilai-nilai Sosialisme, tapi justru ingin mengatakan bahwa tidak perlu mencangkok nilai-nilai itu karena ide tentang kebersamaan dan pemerataan telah ada dalam agama ini. Disamping itu yang mempunyai pandangan berbeda mereka yang mempelajari filsafat sosialisme bahwa kedua sistem ini ibarat Timur dengan Barat yang tidak mungkin disatukan (An-Nadwi, 1983). Ketidak-mungkinan tersebut secara teologi tidak bisa terjadi, karena di posisi keduanya berbeda yang satu merupakan agama yang lainnya adalah paham. Akan tetapi memungkinkan pada konsep sosialis yang ada dalam Islam dan Sosialisme Barat.

Menurut Tjokro, dengan sosialisme Islam hak individu masyarakat tetap terjamin, yang penting bukan membangun kondisi sama rata sama rasa, tetapi membangun semangat berkompetisi dengan keahlian masing-masing, karena setiap orang memang dilahirkan tidak untuk sama rata sama rasa dengan orang lain, apalagi kalau kemudian di sama rasa sama rata akan melalui kediktatoran (Tjokroaminoto, 2003) Setiap orang bebas mengembangkan keahliannya, memperoleh kekayaan dengan keahliannya itu, namun tidak dengan jalan menindas orang lain. Bahkan Tjokro menambahkan, dengan berusaha untuk menjadi kaya raya melalui cara yang halal, maka kekayaan atau harta benda yang menurut Islam hanya titipan Tuhan itu dalam prosentase tertentu harus diberikan kepada orang lain yang masih miskin, yang disebut sedekah, di mana ada dua kategori: Sedekah yang besarnya tergantung pada kemauan atau keikhlasan yang memberikan, dan kedua yang sudah dengan ukuran prosentase tertentu dari total kekayaannya yang disebut zakat (Esposito, 1984).

Memang diakui di samping kelompok-kelompok radikal, bahkan perorangan Islam masih banyak sekali yang anti dengan istilah. Pengalaman sejarah yang terjadi di negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam dalam hubungannya dengan sepak terjang kolonialisme Barat memang menjadi salah satu pemicu, sehingga apa saja yang dianggap “produk Barat” termasuk demokrasi dan sosialisme, secara a priori dimusuhi dan dikategorikan sebagai “tidak sesuai dengan Islam” Padahal sekali lagi, sosialisme di sini adalah yang diangkat dari konsep-konsep untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diajarkan Islam. Sebagaimana pandangan Ali Syari’ati bahwa sosialisme merupakan suatu keharusan dalam pembentukan kepribadian umat agar saling menjaga memberikan perhatian sehingga kalangan umat tidak ada yang tertindas. Serta menghindari kediktatoran dan otoritarian (Syariati, 1993).

Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan sebagai usaha membina dan membangun pribadi manusia dari aspek-aspek rohani dan jasmani juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan, baru dapat tercapai bila mana berlangsung suatu proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhan (Arfin, 2000).

Pada dasarnya pendidikan bertujuan sebagai sarana untuk memelihara kehidupan manusia (Langgulung, 1995). Dalam kehidupan, tidak ada sesuatu yang bebas nilai. Setiap tingkah laku dan kreativitas manusia pastilah ada yang melandasinya. Landasan atau dasar-dasar perbuatan manusia disebut pandangan hidup, *weltanschauung*, atau paradigma. Menurut Murtadlo Muthahari, pandangan hidup adalah bentuk dari sebuah kesimpulan, penafsiran, hasil kajian yang ada pada seseorang berkenaan dengan alam semesta, masyarakat dan sejarah (Muthahari, 2001), serta dianggap memiliki kebenaran dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat atau bangsa dan memberikan pertimbangan dalam merumuskan cita-cita dan kebahagiaan yang akan dicapai. Prinsip-prinsip hidup biasanya bersumber dari pandangan hidup yang dianggap memiliki kebenaran dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat atau bangsa dan memberikan pertimbangan dalam merumuskan cita-cita dan kebahagiaan yang akan dicapai (Jalaluddin, 2001).

Demikian halnya pendidikan tidak pernah lepas dari pengaruh paradigma. Pandangan hidup yang berbeda menyebabkan konsep pendidikan yang berbeda pula. Setiap masyarakat berusaha mendidik dan mengasuh anggotanya, terutama generasi mudanya menurut cita-cita yang dimilikinya, oleh karena cita-cita setiap masyarakat itu berbeda, maka teori pendidikannya pun berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain (Langgulung, 1995). Sebagai penguatan dapat direnungkan kembali pernyataan Karl Mannheim, dikatakan bahwa pendidikan hanya dapat dipahami bila diketahui siapa mengajar siapa, di masyarakat mana dan di mana serta untuk posisi sosial apa anak dididik itu dididik (Mannheim, 1991).

Islam adalah cara hidup di mana al-qur'an dipercaya sebagai dasar cara-cara hidup Islam tersebut. Berbicara pendidikan islam tidak bisa lepas dari pegertian tentang prinsip-prinsip islam. Dikatakan Kuntowijoyo bahwa tauhid adalah pusat dari semua orientasi nilai dalam islam, atau sebagai prinsip-prinsip islam. Dan aktualisasinya ke tataran semesta merupakan wujud puncak dari ketauhidan itu sendiri. Dalam kontek inilah islam disebut sebagai rahmatan lil'alamin, rahmat untuk alam semesta termasuk untuk kemanusiaan. Jadi islam adalah agama yang mementingkan serta memperhatikan manusia sebagai bagian dari tujuan sentralnya (antrophosentrism atau dikenal dengan humanisme). Inilah yang menjadi nilai dasar islam. Namun humanisme dalam islam adalah humanisme dalam koridor mendekatkan diri pada Allah, itu yang dikenal sebagai humanisme Teosentrik, yaitu agama yang memusatkan diri pada keimanan terhadap Tuhan tetapi yang mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia (Kuntowijoyo, 19991).

Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya, termasuk dalam pendidikan. Sebagaimana Achmadi, menjadikan paradigma humanisme teosentrik sebagai paradigma ideologi pendidikan islam (Achmadi, 2005).

Istilah pendidikan Islam pada umumnya mengacu pada term *al-tarbiyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut term *al-tarbiyah* yang lebih populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam. Sedangkan *al-ta'lim* dan *al-ta'dib* jarang digunakan. Pada kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam (Nizar, 2002). Penggunaan istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *Rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan arti tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Penggunaan term *al-tarbiyah* untuk menunjuk makna pendidikan Islam dapat dipahami dengan melihat firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat: 24:

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhan, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. Al- Isra': 24). (Depag RI, 1986).

Tarbiyah yang berarti mendidik dan memelihara implisit di dalam istilah *Rabb* (Tuhan) sebagai *Rabb al-'alamin*. Allah sebagai pendidik dan pemelihara alam semesta Maha mengetahui segala kebutuhan manusia "hamba" yang dididik-Nya. Jadi jelas bahwa pendidikan semata untuk memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terbaik. Konsekuensinya sebagai pendidik manusia harus mengetahui kebutuhan anak didiknya, yaitu memelihara dan mengembangkan sesuai potensi (fitrah)nya. (Achmadi, 2005).

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dapat dijabarkan konsep *al-Tarbiyah* sebagaimana Abdur-Rahman An-Nahlawi yang dikutip oleh Achmadi, ia menjabarkannya dalam empat unsur: 1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia; 2. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaannya; 3. Mengembangkan potensi insani (SDM) untuk mencapai kualitas tertentu; 4. Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. (Achmadi, 2005).

Implikasi penggunaan istilah dan konsep *tarbiyah* dalam pendidikan islam ialah: 1. Pendidikan bersifat humanis teosentris, artinya berorientasi pada fitrah dan kebutuhan dasar manusia yang diarahkan sesuai dengan sunnah (skenario) Tuhan, pencipta; 2. Pendidikan bernilai ibadah karena tugas pendidikan merupakan bagian tugas dari kekhilafahnya, sedangkan pendidik yang hakiki adalah allah Rabbul'alamin; 3. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan. (Achmadi, 2005).

Bertolak dari konsep *tarbiyah* tersebut pada hakekatnya pendidikan islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma islam. Konsep manusia seutuhnya dalam pandangan islam dapat diformulasikan secara garis besar sebagai pribadi muslim, sebagaimana Achmadi ungkapkan, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif dan konstruktif. Itulah cerminan manusia yang pantas menyandang titel *khalifah fi al-ardl.* (Achmadi, 2005).

Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa pendidikan islam pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip ajaran islam yang bersifat universal, yang oleh Achmadi disebut sebagai ajaran humanisme teosentrisk. Inti dari prinsip ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan selalu berada dalam bingkai *taqorrhubb* kepada Allah sehingga martabat dan kemuliaan manusia tetap terwujud. Selain memusatkan perhatiannya pada fitrah manusia dengan SDM-nya juga dilaksanakan prinsip-prinsip ke-tauhidan, baik tauhid *Rububiyyah* maupun *Uluiyyah*. Dalam praktiknya paradigma humanisme teosentrisk juga mengakses rasionalitas, kebebasan dan kesamaan dengan tetap dalam bingkai nilai-nilai trancendental, yang pada akhirnya menuju kepada pendekatan diri kepada Allah. (Achmadi, 2005).

Dihadirkannya manusia di muka bumi jelas bukan tanpa tujuan. Manusia sebagaimana firman Allah adalah sebagai *Abdullah* dan *khalifatullah* yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, manusia sebagai hamba Allah telah diposisikan sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai wakil Tuhan dalam mengatur dan memakmurkan kehidupan di planet ini. (Darwis, 2001). Kedudukan manusia tersebut sebagaimana termaktub dalam al-qur'an surat Adz-Dzariyat: 56, diterangkan hakekat tujuan diciptakannya manusia:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 56)". (Depag RI, 1986).

Juga diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia menempati kedudukan istimewa dalam jagad ini, dia adalah khalifah di atas bumi, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 30:

"Ingatlah ketika Tuhanmu memfirmankan kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. Al- Baqarah: 30). (Depag RI, 1986).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, manusia dibekali dengan berbagai potensi yang diperlukan dalam mengemban tugas sebagai makhluk Allah di muka bumi (Nizar, 2002). Sebagaimana dijelaskan M. Rasyid Ridha (Ridha, tt) dalam tafsir *al-manar*, bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu Adam (manusia dan keturunannya) yang telah dilengkapi dengan

berbagai potensi. Adapun dijadikannya Adam sebagai khalifah di bumi adalah agar ia menjalankan amanah Allah yaitu menegakkan aturan-aturan-Nya, menampakkan keajaiban Karya-Nya, rahasia-rahasia ciptaan-Nya, keindahan-keindahan hikmah-Nya serta manfaat-manfaat hukum-Nya.

Diterangkan juga bahwa karena ilmulah manusia diangkat menjadi khalifah. Dan karena ilmu juga manusia lebih utama dari malaikat. (Ash-Shidiqy, 1965). Hal ini senada dengan M. Quroish Shihab, ia menerangkan bahwa pengetahuan atau potensi berilmu yang dianugerahkan Allah kepada Adam (manusia) merupakan syarat sekaligus modal utama untuk mengelola bumi ini. Tanpa pengetahuan tersebut tugas kekhilafahan manusia akan gagal, meskipun ia tekun ruku', sujud dan beribadah sebagaimana malaikat. Ditegaskan pula bahwa menurutnya Allah menegaskan bumi tidak cukup dikelola hanya dengan tasbih dan tahmid tetapi perlu dengan amal ilmiah dan ilmu amaliyah. (Shihab, 2000).

Hamka menafsirkan bahwa selain dilengkapi potensi yang berupa ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menunjang fungsi kekhilafahan, manusia dianugerahi potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu akal. Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmunya dan menciptakan teknologi bahkan dengan akalnya itu manusia bisa menguak rahasia-rahasia alam dengan seizin Allah. Maka dari itu Hamka menjelaskan bahwa manusia harus senantiasa menggunakan potensinya seoptimal mungkin dalam kerangka kebaikan dan kemanfaatan, dan ini merupakan bentuk syukur atas karunia yang diberikan Allah. (Hamka, 1982).

Pengembangan potensi (fitrah) yang setinggi-tingginya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. (Langgulung, 1995). Berbagai potensi manusia tidak akan berkembang melainkan dengan Pendidikan. Senada dengan pendapat Achmadi (Achmadi, 2005) dalam buku ideologi pendidikan islam bahwa pendidikan adalah kunci pembuka jalan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan yang sejak lahir manusia miliki. Dari dasar itulah, maka pendidikan menjadi kebutuhan yang niscaya bagi manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh John Dewey bahwa pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia, membimbing dan mengarahkan pertumbuhan aktualisasi potensi yang ia miliki (Jalaluddin, 2001) Atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan H. M. Malik Fajar bahwa pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader (manusia) sebagai khalifah Allah, sehingga secara fungsional keberadaannya menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatal lil'alamin* (Fajar, 1999). Dan itu menjadi tugas bagi setiap insan di dunia untuk merealisasikannya. Berdasar itulah Pendidikan menjadi sesuatu yang penting (diwajibkan) bagi setiap manusia.

Pendidikan Islam Religius-Humanis

Berdasarkan uraian mengenai interpretasi paham kapitalis dan sosialis yang dikaitkan dengan realitas paradigma dalam dunia pendidikan Islam saat ini, maka

perlu adanya upaya konseptual yang dimungkinkan untuk dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir atau dalam istilah Azra memberikan respon yang tepat terhadap dampak-dampak negatif dari Pendidikan berbasis kapitalis dan sosialis dalam konteks pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan mencoba mengwinkan dua aliran yang terkesan saling bertentangan itu namun memiliki kesamaan dalam cita-cita dan tujuan kedalam sebuah konsep paradigma Pendidikan yang humanisme-religius dalam pendidikan Islam, pada setiap komponennya.

Paradigma humanisme religius dipandang sesuai untuk menjawab tantangan kapitalisme global dengan asumsi bahwa dengan penerapan paradigma tersebut, maka pendidikan Islam tidak tergilas oleh dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus globalisasi atau dalam ungkapan Amin Abdullah, bahwa umat Islam tidak boleh berpangku tangan dan hanya sebagai penonton dari luar atas seluruh perkembangan yang terjadi di era globalisasi ini.

Pendidikan Islam saat ini lebih banyak menawarkan konsep “bagaimana untuk menjadi” bukan “mengapa harus menjadi”. Dari sini nampak bahwa pendidikan membingkai anak didik sebagai makhluk pasif, bukan makhluk aktif, yang dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi dunia dalam imajinasinya. Bila pendidikan mengabaikan manusia sebagai makhluk aktif maka pendidikan tidak akan mampu mengakomodasi keutuhan manusia atas kemanusiaannya. Pendidikan seperti ini akan mengarahkan manusia yang serba pragmatis karena dituntut untuk mendapatkan identitas atau gelar sebagai simbol keahliannya dan keilmuannya dalam bidang tertentu namun tidak menyadari mengapa harus memiliki identitas seperti itu. Sementara itu, identitas tidak akan menjawab masalah manusia bila identitas sendiri tidak menjamin manusia bisa memenuhi kebutuhan di tingkat idealitasnya. Hal ini terjadi karena identitas yang dihasilkan tidak didapatkan dari proses pendidikan yang seutuhnya, yakni pendidikan yang melibatkan aspek pasif dan aktif dari diri manusia sehingga manusia mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk yang utuh. Selanjutnya, keutuhan inilah yang akan mempengaruhi persepsi manusia atas dirinya terhadap semesta dan menjadi titik tolak bagi manusia untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang menyekat fitrahnya (sebagai seorang hamba dengan spesifikasi potensi tertentu).

Dalam konteks inilah maka pembaharuan paradigma dalam pendidikan Islam menjadi satu hal yang urgen untuk segera diterapkan. Paradigma humanisme religius merupakan paduan paradigma yang menurut penulis sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan Islam baik dalam konteks khusus Indonesia maupun konteks umum seluruh kawasan muslim dalam rangka menghadapi dampak kapitalisme global saat ini. Artinya, dengan upaya yang bersifat menguatkan kapasitas dari dalam dirinya, pendidikan Islam, akan mampu menunjukkan eksistensinya dan mengikuti perkembangan zaman.

Istilah pendidikan humanis-religius mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yaitu pendidikan humanis dan pendidikan religius. Pendidikan humanis yang menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius agar dapat membangun kehidupan individu (sosial) yang memiliki kemerdekaan, tetapi dengan tidak meninggalkan (sekuler) nilai-nilai keagamaan yang diikuti masyarakat atau menolak nilai ketuhanan (ateisme). (Sutiyono, 2009).

Konsep humanisme religius dalam pendidikan, menurut Abdurrahman Mas'ud, (Mas'ud, 2008), adalah konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Konsep ini jika dimplementasikan dalam praktik dunia pendidikan Islam akan berfokus pada akal sehat (*common sense*), individualisme menuju kemandirian dan tanggung jawab, pendidikan pluralisme kontekstualisme yang lebih mementingkan fungsi dari pada simbol, serta keseimbangan antara *reward and punishment*. Pada intinya, menuju pada proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk religius, '*abdullah* dan *khalifatullah*.³⁹

Beberapa alasan menggunakan paradigma ini adalah bahwa: *pertama*, adanya keberagamaan yang cenderung menekankan hubungan vertikal dan kesemarakan ritual. *Kedua*, akibat dari fenomena tersebut maka kesalahan sosial agaknya masih jauh dari orientasi masyarakat kita. *Ketiga*, potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional, pendidikan belum berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, atau belum *individual-oriented*. *Keempat*, kemandirian anak didik dan tanggung jawab (responsibility) masih jauh dari capaian dunia pendidikan. (Mas'ud, 2008).

Sejalan dengan gagasan tersebut adalah konsep yang dilontarkan Achmadi dengan tawaran konsep humanisme teosentrism. Islam sebagai agama fitrah memiliki konsep humanisme yang secara eksplisit berbeda dengan prinsip-prinsip filsafat, ideologi, dan agama-agama lain. Humanisme Islam adalah humanisme teosentrism, yakni pandangan kemanusiaan tetap dalam bingkai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (tauhid). Oleh karena itu, humanisme teosentrism merupakan nilai inti (*core of value*) dari seluruh sistem nilai dalam Islam. Islam tidak menegaskan pemikiran rasio dalam teologinya, tetapi Islam justru menekankan pentingnya penggunaan daya-daya indra, akal dan hati untuk menemukan kebenaran. Teosentrisme yang dimaksud di sini adalah tauhidi, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. (Achmadi, 2005).

Disparitas pendidikan tentu harus diatasi agar pemerataan kesempatan pendidikan dapat dirasakan banyak pihak, khususnya anak-anak yang termarginalkan. Untuk itu, ada beberapa hal strategis yang perlu dilakukan (Mulyana, 2007).

1. Membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil yang terkucilkan secara geografis maupun sosio-kultural. Upaya yang perlu dilakukan dengan

menggiatkan kembali sekolah kecil, sekolah terapung, sekolah terbuka, sekolah satu atap, dan sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Membuka kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dan kurang beruntung dengan cara memberikan beasiswa pada anak-anak yang berprestasi. Melalui cara ini, kesempatan belajar bagi anak keluarga miskin diharapkan semakin terbuka.
3. Memberikan kesempatan pendidikan kepada anak penyandang cacat yang tereksklusif dari hak pendidikannya. Model pendidikan inklusif dalam arti menyatukan mereka dengan anak-anak normal akan mengurangi terjadinya disparitas pendidikan yang diakibatkan oleh difabilitas individu.
4. Memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak tanpa membedakan aspek gender. Karena itu, akses pendidikan bagi anak perempuan yang cenderung tidak lebih baik dari anak laki-laki perlu diperluas. Demikian pula anggapan yang terkonstruksi secara sosial tentang perbedaan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki harus dihindari.
5. Menyelenggarakan program wajar dikdas 12 tahun untuk memperluas pemerataan dan akses pendidikan bagi peserta didik tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SMA). Program ini dinilai strategis mengingat anak lulusan SMA akan memasuki usia produktif, sementara beban biaya sekolah yang harus ditanggung keluarga tidak mampu masih cukup tinggi.
6. Merealisasikan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang anggaran pendidikan yang mencapai 20%. Hingga kini tuntutan anggaran tersebut belum secara serius dipenuhi dari APBN maupun APBD sehingga pemerataan pendidikan belum benar-benar proporsional. Penyisihan anggaran dari APBN yang hanya kurang lebih 7% tampaknya telah melahirkan varian persoalan dalam bidang pendidikan.
7. Menegaskan kembali pentingnya orang-orang kaya dalam membantu kaum miskin. Kocek tebal konglomerat sudah saatnya disisihkan untuk membantu orang-orang tak berdaya. Sebab pada hakikatnya kepemilikan kekayaan itu hanyalah kepemilikan sementara waktu yang tidak terlepas dari peran-peran orang miskin.

Ketujuh hal tersebut penting dijadikan prioritas pemerataan kesempatan pendidikan agar tidak ada lagi anak yang ketinggalan. *No child left behind*, itulah semestinya yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan rakyat kaya dalam merealisasikan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang telah menjadi kesepakatan bersama. Di tengah-tengah keprihatinan yang dialami oleh bangsa ini, semua pihak harus tetap optimis untuk terus menerus memperjuangkan HAM, demi kemajuan dan pemerataan pendidikan.

Interpretasi ulang atas pemahaman kapitalis dan sosialis menjadikan lembaga Pendidikan tidak perlu ragu lagi dalam menata manajemen Pendidikan yang berbasis sosial kemasyarakatan dengan mengedepankan pelayanan dan mutu

lulusan yang berkualitas tanpa harus membebankan biaya Pendidikan pada kelompok tertentu. Dalam hal ini diperlukan upaya dan kebijakan dari lembaga untuk bisa merangkul semua komponen masyarakat sehingga dapat mengakses Pendidikan Lembaga yang bermutu tanpa membedakan kelas sosial. Program nyata yang perlu direalisasikan misalnya dengan mensyaratkan bagi peserta didik baru yang akan masuk Lembaga favorit untuk membiayai satu peserta didik yang kurang mampu sampai lulus, atau bisa juga dengan subsidi silang dan pemberian beasiswa dari Lembaga penyelenggra pendidikan.

Kesimpulan

Paham kapital merupakan suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan terminologi ini secara otomatis paham kapitalis telah merusak tatanan sosial masyarakat dengan munculnya kelas atas bawah yang potensial menimbulkan kesenjangan dan persaingan tidak sehat. Sebenarnya tidak ada yang istimewa tentang kapitalisme dalam Islam, bahkan Islam melarang eksplorasi dan penguasaan atas hak pribadi secara berlebihan. Interpretasi kaptalis dalam pendidikan Islam dilakukan dengan pengumpulan modal dalam rangka pemeratan Pendidikan dan sumber dana untuk mendapatkan pengetahuan melalui Pendidikan yang berkualitas. Sedangkan sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern. Di dalam Islam sendiri sebenarnya telah ada unsur sosialisme atau tanggungjawab sosial yang diwujudkan dalam pembebasan jiwa secara penuh dan persamaan kemanusaan yang tidak membedakan kelas diantara manusia, kecuali amal saleh dan tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa.

Manusia dianugrahi akal yang membedakan dengan makhluk lainnya, dengan akal inilah manusia memperoleh ilmu pengetahuan melalui Pendidikan. Maka pendidikan menjadi kebutuhan yang niscaya bagi manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Status manusia sebagai '*Abdullah* dan *Khalifatullah*, bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader (manusia) sebagai khalifah Allah secara fungsional demi terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatal lil'alamin*. Penafsiran ulang paham kapitalis dan sosialis yang terintegrasi ke dalam Pendidikan Islam adalah sebagai upaya jalan keluar atas ketimpangan paradigma berpikir dan dikotomi Pendidikan kelas atas dan bawah. Hal akan berpengaruh terhadap kesiapan generasi umat Islam dalam menyongsong era globalisasi 4.0 dan 5.0. Pendidikan religius humanis merupakan salah satu tawaran dari konsep humanisme teosentrik sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme guna mengimbangi imbas Pendidikan kapitalisme global. Paradigma Pendidikan yang

religus humanis ini kemudian akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya, termasuk dalam dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Achmadi, 2005, Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- An-Nadwi, Mas'ud, 1983, Islam dan Sosialisme, Risalah, Bandung.
- Arifin, M., 2000, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Armando, Nina M, 2005, Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ash-Shidiqy, M. Hasybi, 1965, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nu, Juz I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Az-Zarnuji, Asy-Syekh, tt, Daru Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, Indonesia.
- Darmaningtyas, 2004, Pendidikan yang Memiskinkan, Galang Press, Yogyakarta.
- Darwis, Jamaluddin, 2001, Dinamika Pendidikan Islam, dikutip dari buku Paradigma Pendidikan Islam, Pustaka Religius, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, Gramedia, Jakarta.
- Espósito, Jhon L, 1984, Islam dan Pembaharuan, Rajawali, Jakarta.
- Fadjar, Malik, 1999, Reorientasi Pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, Sebuah Pengantar Komodifikasi Pendidikan Sebagai Ancaman Kemanusiaan, Insist Press, Cindelaras, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamka, 1982, Tafsir Al Azhar, Juz I, Pustaka Panji Mas, Jakarta.
- Jalaluddin, 2001, Teologi Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kahmad, Dadang, 2002, Sosiologi Agama, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Khobir, Abdul, 2010, Islam dan Kapitalisme, RELIGIA Vol. 13, No.2. <http://ejournal.iainpekalongan.c.id/index.php/Religi/article/download/183/545>.
- Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung.
- Langgulung, Hasan, 1995, Manusia Dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan, PT. Al-Husna Dzikra, Jakarta.
- Ma'arif , Ahmad Syafii, 1985, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta.

- Magnis-Suseno, Franz, 2001, Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mannheim, Karl, 1991, Sosiologi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mas'ud, Abdurrahman, 2008, Pengantar dalam Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas, UMM Press, Malang.
- Murningsih, Rochiyati, 2005, Sistem Ekonomi; Telaah Kapitalis, Sosialis Dan Islam, Jurnal Studi Islam, Vol. II, No.2.
- Muthahari, Murtadlo, Mas'ale-Ye Syenokh, pentj. Muhammad Jawad Bafaqih, 2001, Mengenal Epistemologi, Lentera, Jakarta.
- Nanji, Azim, 2003, Peta Studi Islam: orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Nizar, Samsul, 2002, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, Ciputat Pers, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Eko, 2003, Kiri Islam; Jalan Menuju Revolusi Sosial, Insist Press, Yogyakarta.
- Preiere, Paulo, 1991, Pendidikan kaum tertindas, LP3ES, Jakarta.
- Quthb, Sayyid, 1993, Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fī al-Islam, Dar al-Syuruq, Mesir.
<http://www.sinaimesir.com>.
- Rahman, Arif. dkk., 2009. Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0, Komojoyo Press, Depok.
- Ridha, M. Rasyid, Tafsir Al-Manar, Beirut-Libanon, tth.
- Risky, Awalil, 2007, Agenda Neoliberalisme Mencengkeram Perekonomian Indonesia, UCY Press, Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish, 2000, Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati, Jakarta.
- Sofwanudin, 2004, Kapitalisasi Pendidikan Islam Sebuah Keharusan, EDUKASI, VOL II, NO. 2.
- Solomon, Robert C, dan Kathleen M. Higgins, 2002, Sejarah Filsafat, terj. Saut Pasaribu, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Sutiyono, Agus, 2009, Sketsa Pendidikan Humanis Religius, Jurnal Insania, Vol. 1, No. 2.
- Syari'ati, Ali, 1993, Humanisme dalam Islam, Terj. Hamidy. Bulan Bintang, Jakarta.
- Tjokroaminoto, HOS, 2003, Islam dan Sosialisme, TriDe, Yogyakarta.

Turner, Bryan S, 2000, Marxisme dan Revolusi Sosial dalam Islam, Nuansa, Bandung.

Wibisono, Jusuf, 2012, Islam dan Sosialisme, Bulan Bintang, Jakarta.

Winardi, 1996, Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis, CV. Remadja Karya, Bandung.